

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PRINSIP
KEADILAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
178/PUU-XXII/2024 TENTANG FRASA “SARJANA HUKUM” PADA
PERSYARATAN CALON JAKSA**

SKRIPSI

Oleh

Citra Kharisma

NIM. 05020422031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Kharisma
NIM : 05020422031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Prinsip Keadilan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-
XXII/2024 Tentang Frasa "Sarjana Hukum" pada
Persyaratan Calon Jaksa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 November 2025

Yang menyatakan,



Citra Kharisma
NIM. 05020422031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Citra Kharisma

NIM : 05020422031

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Prinsip Keadilan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024
Tentang Frasa "Sarjana Hukum" pada Persyaratan Calon Jaksa

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 November 2025

Pembimbing,



Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Citra Kharisma

NIM. : 05020422031

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Prinsip Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024 Tentang Frasa “sarjana hukum” pada Persyaratan Calon Jaksa

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Dr. Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 12 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Citra Kharisma
NIM : 05020422031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
E-mail address : citrakharisma227@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Prinsip Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024 tentang Frasa “Sarjana Hukum” pada Persyaratan Calon Jaksa.

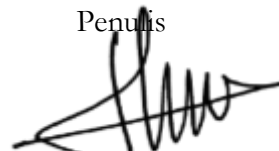
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2026

Penulis



(Citra Kharisma)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mewujudkan keadilan melalui *judicial review*. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024 terkait problematika frasa “sarjana hukum” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan sebagai syarat calon jaksa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak menghilangkan potensi diskriminasi berbasis formalitas gelar akademik tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dalam rekrutmen kejaksaan. Skripsi ini memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji keadilan persyaratan “sarjana hukum” bagi calon jaksa? dan 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji keadilan persyaratan “sarjana hukum” bagi calon jaksa?

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal, skripsi, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif dengan mengaplikasikan teori keadilan, teori politik hukum, teori kewenangan, teori hak asasi manusia dan teori *fiqh siyāsah dustūriyah* untuk menganalisis isu hukum yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat diterima dalam permohonan pengujian mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (*equality before the law*). Secara yuridis, terdapat kontradiksi antara pengakuan formal kesetaraan gelar akademik dengan praktik seleksi yang membatasi akses jabatan berdasarkan nama program studi, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Dari perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*, putusan ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang mengutamakan perlakuan *al-'adālah*, *al-musāwāh* dan kemaslahatan umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip (*equality before the law*) serta perlakuan *al-'adālah* pada perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*. Oleh karena itu, direkomendasikan perlu adanya penafsiran konstitusional terhadap frasa “sarjana hukum” yang mencakup semua lulusan program studi hukum yang kompeten dan terakreditasi dari perguruan tinggi umum maupun keagamaan. Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak hanya fokus pada aspek formal *legal standing*, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Sehingga diperlukan revisi regulasi dan mekanisme seleksi calon jaksa agar sesuai dengan nilai keadilan dan prinsip *fiqh siyāsah dustūriyah*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Landasan Teori	18
H. Definisi Operasional	25
I. Metode Penelitian	29
J. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI Keadilan, POLITIK HUKUM, KEWENANGAN, HAK ASASI MANUSIA, DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	35
A. Teori Keadilan	35
1. Pengertian Keadilan	35
2. Keadilan Menurut Para Ahli	37
3. Keadilan dalam Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40
B. Teori Politik Hukum	43
1. Pengertian Politik Hukum	43
2. Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	47
C. Teori Kewenangan.....	49
1. Pengertian Kewenangan.....	49
2. Unsur-Unsur Kewenangan	52
3. Sumber Perolehan Kewenangan	53

D.	Teori Hak Asasi Manusia.....	55
	1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	55
	2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	57
	3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	59
E.	Teori <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	61
	1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	61
	2. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> dan Ruang Lingkup	64
	3. Keadilan dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	65
BAB III TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KEADILAN PERSYARATAN “SARJANA HUKUM” BAGI CALON JAKSA		68
A.	Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024	68
	1. Pokok Permohonan	70
	2. Pertimbangan Hukum	71
	3. Kesimpulan dan Amar Putusan.....	72
B.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Keadilan Persyaratan “sarjana hukum” Bagi Calon Jaksa.....	73
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KEADILAN PERSYARATAN “SARJANA HUKUM” BAGI CALON JAKSA.....		85
A.	Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	85
B.	Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Keadilan Persyaratan “sarjana hukum” Bagi Calon Jaksa	96
BAB V PENUTUP.....		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....		106
LAMPIRAN.....		116
BIOGRAFI PENULIS		124

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengumuman Kejaksaan Nomor: PENG 11/C/Cp.2/08/2024.....	74
Tabel 2 Gelar Akademik Program Studi di PTKIN	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Azis Nur, And Maheru Fata. Impresi Politik Hukum Nasionall Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundang-Undangan Nasional. 2015, 1849.

Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. 9, No. 12 (2013): 43.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, “*Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang*” (Jakarta: Pusat Analis Dan Layanan Informasi, 2013), 11-12.

Mau, Hedwig Adianto, And Tinton Ditisrama. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Cetakan Pertama. Purwokerto, Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Edisi Ke Dua Prenadamedia Group, 2024.

Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,” 2013.

Nasir, Muh. Politik Hukum. Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025.

Otong Rosadi, Dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

Syafuri. *Konsep Pemilihan Kepala Negara Perspektif Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Siyasalah Islami*. 2, No. 1 (2016): 20–32.

Tutik, Titik Triwulan, And Nunuk Nuswardani. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Edisi Pertama. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Edisi Pertama. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal Dan Skripsi

Ashri, Muhammad Rusydi. “Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-

2013).” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Abdul Arif. “Konsep Dasar Kepemimpinan Islam Dalam Menumbuhkan Jiwa Kepemimpinan Pada Siswa Di SMPIT Bina Benuanta Tanjung Selor.” *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, No. 1 (2025): 131.

Abdullah, Asnawi, And Safriadi Safriadi. “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, No. 1 (June 2022): 56.

Almaida, Zennia, And Moch Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai.” *Law Privat* 9, No. 1 (2021): 222.

Amiliya, Diea, And Siti Tiara Maulia. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Causa* 4, No. 10 (2024): 19.

Andi Muh. Taqiyuddin Bn, And Abdul Syatar. “Perbedaan Fatwa Dan Qada Serta Implementasinya Di Indonesia.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, No. 1 (2022): 5.

Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, And Ewaldo Duta Salsa. “Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, No. 2 (2020): 430–31.

Artyo, Yovereld Alexetty, Novita Aristyana, And Aline Philia Antana Sinaga. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *JATISWARA* 39, No. 2 (July 2024): 190.

Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, And Muhana Ayu Devita. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 306 (November 2024): 302–13.

Ayu, Kemala, And Nanda Suryadi. “Filsafat Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Tijakan Normatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, No. 2 (2025): 1605.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Hilman Nurjaman, And Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 6.

- Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (April 2020): 23–24.
- Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar, And Dedy Syahputra. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa IV*, No. 2 (2023): 14.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Legal Protection Against Legal Uncertainty Of Tacit Approval Under The Indonesian Job Creation Law." *South-East Asian Journal Of Advanced Law And Governance (SEAJ ALGOV)* 2, No. 1 (2024): 199.
- Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, And Nazaruddin Nazaruddin. "Adil Dalam *Al-Qur'ān*: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, No. 2 (December 2024): 39.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, And Sulthoni Ajie. *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. 07, No. 1 (2025): 599.
- . "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, No. 1 (2025): 599.
- Dedeng. "Amar Putusan Pada Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2018, 179.
- Diantika Chayani And Arif Wibowo. "The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia." *Justices: Journal Of Law* 2, No. 3 (August 2023): 137.
- Efendi, A'an, And Sudarsono Sudarsono. "Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya." *Masalah-Masalah Hukum* 53, No. 2 (July 2024): 146.
- Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 6 (2022): 16.
- Fachrurozi, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, No. 12 (2015): 301.
- Fahmi, Fahmi, Moch Zaidun, And Bambang Suheryadi. "The Special Power Concept Of State Attorney General In Preventing The Governmental Product/Service Procurement-Related Crime In Indonesia." *Yuridika* 36, No. 3 (September 2021): 607.

- Fauziyah, Wiwin And Farkhani. "Analisis Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 Tentang Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan Dalam Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, No. 2 (January 2025): 130.
- Fudika, Moza Dela, And Ellydar Chaidir. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. 2019, 72.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, No. 3 (2020): 94.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Mustofa Hasan, And Rahmat Syafe'i. "Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-'Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 2 (December 2023): 212.
<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V8i2.15232>.
- Hanadi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, No. 1 (April 2019): 354.
- Hasanudin Dardiri, Ahmadi. "Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Dan Kemungkinan Implementasinya Di Indonesia." *Millah* 16, No. 2 (2017): 278.
- Idrus', Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah." *Jurnal Ad-Daulah* 10, No. 2 (Desember 2021): 130.
- Irwansyah, And Zaenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 69.
- Janah, Refita Fadilatul. "Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (December 2022): 352.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (August 2014): 119–21.
- Kadri, Wahijul, And Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. 1 (2022): 57.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, And Solihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 4.

- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, No. 1 (2018): 68–69.
- Kholis. "Memahami Hadis Tentang Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Konteks Ke-Indonesiaan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, No. 1 (2022): 118.
- Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, And Eka Prasetiawati. "Konsep Al-Musāwāh Dalam *Al-Qur'ān*: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir* 4, No. 2 (2025): 242.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahu 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990." *Millah* 16, No. 2 (January 2017): 311.
- Muhaki, Muhaki, And Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, No. 2 (December 2024): 126.
- Muni, Abd, And Abd Munib. "Hermeneutika Yuridis : Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, No. 2 (September 2023): 90.
- Muthalib, Salman Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam *Al-Qur'ān*." *Tafse: Journal Of Qur'anic Studie* 4, No. 2 (2019): 151.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif *Al-Qur'ān*." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, No. 1 (April 2017): 39.
- Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, And Mukhamad Rifa'i. *Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. 7 (2024): 47.
- Nadziroh, Rimby, Galih Lintang Asmarandhana, Lutfiah Azzahra, Elok Dwi Kusnila, Tiffani Agustin, And Imam Ghozali. "The Implementation Of Human Rights And The Indonesian Rule Of Law In The Digitalization Era." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 135.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (September 2017): 176.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, And Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (February 2023): 244.

- Nurchayani, Dewita. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 01, No. 01 (2024): 8.
- Penuarloindungan Slis, Namgokma Tonia, Annisa Mutiara Suci, Tasya Fazira Arisma, And Selvi Kurnia Putri. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Of Global Riview* 2, No. 2 (2024): 93.
- Purnani Adam, Desi, And Putu Della Paramitha Narpaduhita. "Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan." *Jurnal Yusthima: Yusthika Mahasaraswat* 4, No. 1 (N.D.): 387–88.
- Qamar, Nurul, And Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, No. 2 (2023): 218.
- Rahman, M Taufiq. "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 2 (June 2022): 213.
- Ramadhani, Arie, And Dewi Ria Agustin. "Hubungan Antara Pemahaman Tentang Ham Dengan Sikap Toleransi Pada Siswa Kelas Viii Semester Genap Smp Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016'2017." *Jurnal Santhet* 1, No. 2 (2017): 35.
- Ramadhani, Indiyastuti. "Politik Hukum Pembentukan Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UNES Law Review* 6, No. 1 (N.D.): 3929.
- Ramli, Muh. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 4 (2025): 6427–29.
- Rasyid, Muh Haras. "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya." *Tomalebbi* 9, No. 2 (June 2022): 93.
- Renata, Janualdi. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 18.
- Rio R, Mohamad Bagas, Rahma Kemala Dewi, And Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, No. 2 (2021): 242.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Gangga Listiawan, Moh. Haidar Ali Al-Hamid, And Ayu Sri Astuti. "Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xiii/2015)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 2 (November 2021): 99.

- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, No. 1 (May 2020): 14–15.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2024): 68.
- Sahidin, Amir. "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, No. 2 (December 2021): 76–77.
- Salman, Tiara, And Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indo." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, No. 2 (2024).
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, And Ridzky Ramadhan. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2023): 4.
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik*, 2020, 7–8.
- Situmorang, Samuel Frans Boris, Ria Juliana Siregar, And Sovia Febrina Tamaulina Simamora³. "Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia." *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 1563.
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia Of Journal* 5, No. 4 (2023): 11.
- Sofian, Muhamad, And Fuad Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan Uud 1945." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, No. 2 (December 2024): 12–23.
- Sofni, Aisyah, And Napisah. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam." *CV. Doki Course And Training* 1, No. 1 (2025): 5.
- Suci Wulandari, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Moh. Bagus, Akhmad Fandik, And Amim Thobary. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (November 2023): 204.
- Sugiono Margi And Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 3 (June 2022): 16.
- Sukardi, And E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-

Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya.”
Yuridika 27, No. 2 (2012): 151.

Sunaryo, Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya.”
Jurnal Konstitusi 19, No. 1 (March 2022): 002.

Sutono, Sutono, Ririn Handayani, And Liesma Maywarni Siregar. “Keadilan Organisasi Untuk Menunjang Kinerja Karyawan: Suatu Tinjauan.”
Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta 5, No. 2 (February 2022): 527–28..

Syahputra, Ade, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Sania Mar'i Adnanda Haraha, Wanda Amelia Urba, And Eka Yusnaldi. “Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 32209.

Umar, Nasaruddin. *Relasi Shari'at Islām Dan Negara Dalam Dimensi Hukum Tata Negara Indonesia*. No. 2 (2014): 75.

Wahyuni Dekananda, Atika, And Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 3 (March 2024): 254..

Winarto, Winarto. “Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`An.” *Shari'at I: Jurnal Studi Al-Qur`an Dan Hukum* 3, No. 01 (May 2017): 2–3.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. “Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Kepada Korporasi Di Wilayah Hutan Konservasi.” *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2018, 6.

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.”
Jurnal Mimbar Hukum 36, No. 2 (2024): 504.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 28A UUD NRI 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum Program Studi Ilmu Syariah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 21 Maret 2025.

Surat Kabar

“AMR BIN AL-ASH / Pembebas Mesir Dari Cengkaman Romawi.” *HASMI :: Sebuah Gerakan Kebangkitan*, n.d. Accessed December 28, 2025. <https://www.hasmi.org/amr-bin-al-ash-pembebas-mesir-dari-cengkaman-romawi/>.

“Asas Point d’Intérêt Dan Point d’Action Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Dalam Hukum Acara Perdata – ALO.” 2025. <https://alchemistgroup.co/asas-point-dinteret-dan-point-daction-sebagai-dasar-kewenangan-peradilan-dalam-hukum-acara-perdata/>.

Ishaq, azmi R. “5 Perbedaan Ptn Dan Ptkin.” *Latis Supercamp*. Last modified May 15, 2025. Accessed June 1, 2025. <https://supercampalumniui.com/5-perbedaan-ptn-dan-ptkin/>.

Kab-Jayawijaya, KPU. “Teori Keadilan Menurut John Rawls: Membangun Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Kesetaraan.” November 11, 2025. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8548_teorikeadilan-menurut-john-rawls-membangun-keseimbangan-antara-kebebasan-dan-kesetaraan.

Kompasiana. “Fleksibilitas Hukum: Thagayyuril Ahkam Bi Taghayyuril al-Azminah Wal Amkinah, Wal Ahwal, Wan Niyat, Wal 'awaid (Seri Belajar Qawaid Fiqhiyah).” 2025. <https://www.kompasiana.com/aliaminulloh2036/686608c7ed641576484f2332/qaidah-fiqhiyah-tentang-fleksibilitas-hukum-thagayyuril-ahkam-bi-taghayyuril-al-azminah-wal-amkinah-wal-ahwal-wan-niyat-wal-awaid>.

Kurniawan, Syukri. “Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia.” www.dandapala.com, 2025. <https://dandapala.com/article>.

Qowiyul Iman, Rifqi. “Konsep Tafrīq Al-Qadā’ī Dalam Peradilan Agama.” 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konsep-tafriq-al-qaai-dalam-peradilan-agama-0sN>.

“S1 Hukum Tata Negara Siyasah | Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.” Accessed December 28, 2025. <https://fsh.uinjkt.ac.id/id/s1-hukum-tata-negara-siyasah>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 28, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.

Wikipedia, “Lady Justice,” November 4, 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_Justice&oldid=1320386014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A